

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan perubahan kebijakan yang dilakukan Iran setelah diberi sanksi oleh FIFA. Selama 40 tahun sejak revolusi Iran wanita tidak diperbolehkan menonton sepakbola pria di stadion secara langsung, hal ini dikarenakan penggunaan paham Teokrasi yang mana Iran menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan pada agama Islam.

Fédération Internationale de Football Association atau International Federation of Football Association (FIFA) mengecam Iran atas kasus meninggalnya “*Blue Girl*” yang terjadi pada 9 September 2019 bernama Sahar Khodayari di Iran. Sahar diketahui membakar dirinya setelah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Iran karena akan menonton pertandingan Sepak bola di stadion Azadi Iran.¹

Sahar Khodayari adalah seorang wanita yang melakukan penyamaran menjadi pria untuk menonton bola di dalam stadion Tehran Azadi. Aturan sepak bola Iran melarang wanita menonton dalam stadion langsung karena hal ini bersangkutan dengan aturan sistem pemerintahan Teokrasi Islam yang masih digunakan Iran sebagai dasar aturan negaranya, sehingga Sahar Khodayari terkena hukuman penjara selama 6 bulan atas tindakannya.² Sahar Khodayari muncul di dalam Stadion Azadi tanpa hijab ketika dirinya menyamar sebagai pria pada bulan maret berdasarkan pada data yang

¹ Gilang Ramadhan, “FIFA Kecam Iran Karena Kasus Blue Girl, Gadis Yang Bakar Diri,” last modified 2019, <https://tirto.id/fifa-kecam-iran-karena-kasus-blue-girl-gadis-yang-bakar-diri-ehVz>.

² Lila Bahadur Bishwakarma, “Caste-Based Discrimination in Schooling: A Narrative Inquiry,” *Nepalese Journal of Development and Rural Studies* 14, no. 1–2 (2017): 56–62.

disampaikan oleh Amnesti Internasional. Dirinya dihentikan oleh petugas keamanan dari percobaan untuk memasuki stadion dan menemukan bahwa dirinya adalah wanita. Sahar Khodayari disebut sebagai “Blue Girl” karena dia datang dalam pakaian jersey biru tim sepak bola Iran favoritnya yaitu Esteghlal.³

Penangkapan Sahar Khodayari terjadi karena hal ini bersangkutan dengan Iran yang menganut sistem pemerintahan Teokrasi. Teokrasi adalah sistem pemerintahan berbasis Agama dimana Iran memiliki sistem pemerintahan berdasarkan pada agama Islam. Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin pertama Iran pasca revolusi Iran menganjurkan konsep negara Islam dipimpin oleh pemerintah yang memiliki kualitas agama tinggi dengan tujuan agar memastikan bahwa keputusan Islam dipatuhi dan diterapkan dalam garis besar dan prinsip-prinsip umum Syariah dalam negara yang menganut konsep Teokrasi.⁴

Sistem Teokrasi di Iran memberikan dampak kepada wanita sehingga hak wanita di Iran sangat dibatasi sampai pada titik dimana wanita bahkan dilarang untuk menonton olahraga pria di dalam stadion termasuk olahraga yang sangat difokuskan Iran yaitu olahraga bola voli.⁵ Di Iran larangan wanita di stadion olahraga merupakan simbol dari penindasan perempuan di seluruh negeri. Wanita menghadapi diskriminasi serius pada masalah-masalah seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Wanita yang berusaha untuk menyuarakan suaranya meminta kesetaraan akan

³ Nada Altaher, “Iranian Woman Denied Soccer Stadium Access Dies after Setting Herself on Fire,” last modified 2019, <https://edition.cnn.com/2019/09/10/football/iran-football-women-sahar-khodayari-spt-intl/index.html>.

⁴Virgемarie A. Salazar, “Theocracy in Iran: From an Ideology to an Islamic Republic,” *SSRN Electronic Journal*, no. February (2015).

⁵ Human Rights Watch, “Women’s Rights in Iran,” *Human Rights Watch*, last modified 2015, <https://www.hrw.org/news/2015/10/28/womens-rights-iran>.

langsung dimasukkan ke dalam penjara, bahkan sampai pada tingkatan wanita dilarang untuk mencegah kehamilan dimana hal ini dikarenakan pemerintah ingin populasi Iran tumbuh. Bukan hanya wanita yang ditekan pemerintah Iran, siapapun yang secara terbuka mengkritik pemerintah beresiko dijebloskan ke penjara.⁶

Iran adalah negara yang pertama kali di Timur Tengah yang mendapatkan sanksi berupa pelarangan kepada Federasi Sepak bolanya terkait masalah kesetaraan gender, hal ini dikarenakan terdapat kasus khusus yaitu meninggalnya *blue girl* dimana masyarakat global setelah sebelumnya melakukan demonstrasi dengan tujuan mendorong FIFA untuk memberikan sanksi kepada Iran dan memaksa Iran untuk membolehkan wanita masuk dan menonton pertandingan sepak bola tim idamannya.⁷

FIFA sebelumnya pernah melakukan pelarangan kepada beberapa aktor lainnya. Pelarangan kepada Federasi Sepak bola Afghanistan dimana FIFA melarang Federasi Sepak bola Afghanistan untuk terlibat dalam segala hal yang berhubungan dengan sepak bola selama 5 tahun atas kasus skandal pelecehan seksual di Afghanistan pada tahun 2019.⁸ FIFA juga melakukan pelarangan kepada Indonesia dari segala hal yang berhubungan dengan sepak bola internasional pada 2013, 2015 karena kasus korupsi pihak ketiga PSSI, dan kerusuhan pendukung Persija dan Persib yang hingga

⁶ Human Rights Watch, "Women's Rights in Iran."

⁷ Golnaz Esfandiari, "A Score For Equality? FIFA Demands Iran Allow Women Into Soccer Stadiums," *RFERL*, last modified 2019, accessed October 22, 2019, <https://www.rferl.org/a/iran-fifa-demands-allow-women-into-soccer-stadiums/30104333.html>.

⁸ Matias Grez, "FIFA Bans Afghan Football Official for Failure to Act on Sexual Abuse Scandal," *CNN*, last modified 2019, <https://edition.cnn.com/2019/10/11/football/fifa-bans-sayed-aghazada-afghanistan-general-secretary-spt-intl/index.html>.

kini belum selesai.⁹ FIFA sebagai organisasi yang mendukung *gender equality* sebelumnya telah menegur negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi terkait kasus pembedaan dan pembatasan kegiatan atas wanita di negaranya. Hal ini dimaafkan oleh FIFA dan tidak sampai dilakukannya tindakan pelarangan kepada Arab Saudi karena Arab melakukan tindakan cepat mengizinkan wanita untuk masuk dan menonton pertandingan di dalam stadion bersamaan dengan izin terhadap wanita untuk mengendarai mobil.¹⁰

PBB sebelumnya pernah memperingatkan Iran terkait kesetaraan gender di Iran bersifat diskriminasi hukum terhadap wanita yang berada di negaranya mengakibatkan ketidakadilan terhadap wanita di Iran. Berkebalikan dengan keinginan PBB, Iran kemudian melakukan tindakan berupa pembatasan serikat pekerja yang mendukung kesetaraan gender di negaranya dan melemahkan efektivitas mekanisme prosedur pengaduan yang ada terhadap kasus diskriminasi, sehingga menjadikan peringatan dari PBB tidak efektif kepada Iran.¹¹

Desakan dari masyarakat global membuat FIFA memberikan surat peringatan kepada Mehdi Taj selaku presiden Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran (FFIRI) pada 18 Juni 2019. FIFA menetapkan batas waktu hingga 15 Juli 2019 agar memberitahukan langkah konkret yang telah diambil Iran karena hal ini terkait dengan

⁹ Sara Schonhardt and Anita Rachman, "FIFA Bans Indonesia From International Soccer," *Wall Street Journal*, last modified 2015, accessed October 19, 2019, <https://www.wsj.com/articles/fifa-bans-indonesia-from-international-soccer-ahead-of-world-cup-qualifiers-1433496214>.

¹⁰ Bari Weiss, "Why Is FIFA Condoning Gender Apartheid?," *The New York Times*, last modified 2018, accessed October 22, 2019, <https://www.nytimes.com/2018/03/02/opinion/fifa-women-iran-infantino.html>.

¹¹ Rozalina Burkova, "'It's a Men's Club' Discrimination Against Women in Iran's Job Market," *Human Rights Watch*, last modified 2017, <https://www.hrw.org/report/2017/05/25/its-mens-club/discrimination-against-women-irans-job-market>.

izin wanita Iran dan asing yang ingin menonton di stadion dapat menghadiri pertandingan kualifikasi piala dunia di bulan September 2019.¹² Melalui Menteri Olahraga Iran, Jamshid Taghizadeh mengatas namakan Iran mengumumkan bahwa wanita dapat menonton pertandingan timnas pria Iran dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 10 Oktober 2019.¹³

Jamshid Taghizadeh mengatakan bahwa tidak ada larangan hukum tentang keberadaan wanita di stadion dan kami harus mengaktifkan infrastruktur, yang sedang berlangsung. Pandangan kami tentang wanita, di semua tingkatan adalah untuk mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk kesuksesan wanita.”¹⁴

Melalui peringatan secara tertulis maupun tidak tertulis dari FIFA kepada Iran dan mengancam bahwa FIFA akan menanggukhan Republik Islam Iran atas kebijakan yang mana hanya memperbolehkan pria untuk memasuki dan menonton pertandingan sepak bola secara langsung di stadion Azadi Iran. Iran melakukan perubahan dalam aturan negaranya sehingga akhirnya wanita pada hari kamis 10 Oktober 2019 dalam beberapa dekade terakhir sejak revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 diizinkan menonton secara langsung di dalam stadion Azadi Iran.¹⁵

Iran yang memiliki sistem pemeritahan Teokrasi yang berdasarkan pada agama Islam tidak dapat mengubah peraturan negaranya secara mudah dikarenakan memiliki aturan yang berdasarkan pada agama dan tidak dapat dirubah dengan mudah, Iran yang

¹² Esfandiari, “A Score For Equality? FIFA Demands Iran Allow Women Into Soccer Stadiums.”

¹³ Ramadhan, “FIFA Kecam Iran Karena Kasus Blue Girl, Gadis Yang Bakar Diri.”

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Agence France-Presse, “Iranian Women Allowed to Watch Football at Stadium for First Time in Decades,” *The Guardian*, last modified 2019, accessed October 22, 2019, <https://www.theguardian.com/football/2019/oct/09/iranian-women-allowed-to-watch-football-at-stadium-for-first-time-in-decades>.

mengubah aturannya setelah diberikan sanksi oleh FIFA menjadi hal yang unik dan akan diteliti alasan perubahan kebijakan Iran terkait pelarangan wanita di dalam stadion sepak bola Iran.

1.2. Rumusan Masalah

Iran sebagai negara yang menganut sistem Teokrasi Islam selama 40 tahun sejak revolusi Iran tahun 1979 mendapatkan protes dari kaum wanita terkait kebijakan yang mendiskriminasi wanita. Terjadinya kasus *Blue Girl* pada September 2019 menjadikan masyarakat sadar akan kesetaraan gender di dunia ini. Masyarakat global mendesak FIFA untuk memberikan sanksi kepada Iran dengan tujuan agar Iran mengubah kebijakannya yang mendiskriminasi wanita. Iran sebagai negara yang pertama kali di Timur Tengah mendapatkan sanksi berupa *banned* kepada federasi sepak bolanya mengenai masalah kesetaraan gender. FIFA yang memberikan sanksi menyebabkan perubahan kebijakan di Iran dimana pada akhirnya wanita diizinkan untuk menonton pertandingan sepak bola di dalam stadion secara langsung yang mana pada awalnya tidak diizinkan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan berusaha untuk mengangkat penelitian ilmu hubungan internasional yang memiliki pertanyaan penelitian “*Mengapa Iran memilih patuh kemudian mengubah kebijakan Ban on Women in Soccer Stadium pasca sanksi FIFA 2019 ?*”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan alasan Iran mematuhi peringatan FIFA dan mengubah kebijakannya terkait perizinan wanita menonton langsung pertandingan sepak bola di dalam stadion Azadi.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat kepada pembaca dengan tujuan seperti membantu untuk mengetahui alasan Iran dalam mematuhi peringatan FIFA dan mengubah kebijakannya terkait perizinan wanita menonton pertandingan sepak bola pria secara langsung di dalam stadion Azadi.

1.6. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan lima Studi Pustaka sebagai sumber utama untuk membantu peneliti untuk mencapai dan menjelaskan hasil penelitian, studi pustaka yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Babak Fozooni yang berjudul "*Iranian Women and Football*" pada tahun 2007. Penelitian ini menjelaskan tentang kontroversi yang terjadi di Iran terkait diskriminasi terhadap wanita yang dibatasi partisipasinya dalam berbagai bidang terutama dalam bidang olahraga. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Timur Tengah yang memiliki kompleksitas aturan yang tinggi dalam olahraga sepak bola terutama Iran sangat menjaga aturan budaya Islam yang disebut sebagai *Ta'arof* yang berarti etiket dan kesopanan serta hierarki yang berfokus pada pria, sehingga hal ini menjadikan wanita Iran yang mendukung kesetaraan melakukan

gerakan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada setiap wanita Iran agar dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh pria.¹⁶

Pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, waktu dan aktor yang terkait di dalamnya, serta penelitian penulis akan berfokus pada aktor organisasi internasional dan kepentingan Iran dalam mengubah kebijakannya terkait isu gender di Iran.¹⁷ Penulis akan menggunakan studi pustaka ini untuk menjelaskan mengenai kebijakan dan alasan Iran membuat kebijakan yang membatasi wanita dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.

Studi Pustaka yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indra Kusumawardhana, Arry Bainus, dan Rusadi Kantaprawira dengan judul dengan judul “*When FIFA Rules the World: Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016*” pada tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai kemampuan hegemoni FIFA dalam memberikan sanksi kepada negara yang independen, yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai fakta bahwa negara memiliki posisi yang lemah dibandingkan FIFA yang dianggap sebagai representasi institusi global di dunia sepak bola internasional. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai ketidakberdayaan Indonesia sebagai negara menghadapi

¹⁶ Babak Fozooni, “Iranian Women and Football,” *Cultural Studies* 22, no. 1 (2008): 114–133.

¹⁷ Fozooni, “Iranian Women and Football.”

sanksi dari FIFA yang memiliki *Power* dan *Interests* sebagai organisasi internasional.¹⁸

Penelitian ini menyimpulkan bahwa FIFA telah secara luar biasa dapat mempertahankan otonomi dan otoritasnya dalam hal sepak bola, sebagai aktor non-negara FIFA adalah sebuah organisasi internasional yang berhasil memaksa pemerintahan yang berdaulat untuk mengubah kebijakan olah raga yang nampak dari kisruh KEMENPORA *versus* PSSI dan FIFA, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Indonesia tidak berdaya menghadapi FIFA dikarenakan hegemoni FIFA di dalam sistem internasional.¹⁹

Studi Pustaka ini akan digunakan oleh penulis sebagai dasar dari penjelasan mengenai pengaruh hegemoni FIFA dalam dunia persepakbolaan internasional, dan akan digunakan sebagai contoh atas bukti pengaruh hegemoni FIFA dalam dunia internasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari penulis adalah letak pada negara dan isu terkait yang diteliti, dimana penelitian yang dilakukan oleh Indra Kusumawardhana beserta timnya berfokus pada isu kerusuhan supporter dalam persepakbolaan, dan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada isu gender. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada negara yang dijadikan target hegemoni FIFA dimana penelitian ini berfokus pada negara Indonesia, sedangkan penulis berfokus pada negara Iran.

¹⁸ Indra Kusumawardhana, Arry Bainus, and Rusadi Kantaprawira, "When FIFA Rules the World : Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016," *Andalas Journal of International Studies* VII, no. 1 (2018).

¹⁹ Kusumawardhana, Bainus, Kantaprawira, "When FIFA Rules the World : Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016".

Studi pustaka yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marketa Maria Jerabek, Alisson Maxwell Ferreira de Andrade, dan Ana Magdalena Figueroa yang berjudul “*FIFA’s Hegemony: Examples from World Cup Hosting Countries*” pada tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang FIFA sebagai organisasi internasional yang memiliki kekuatan hegemonik atas negara-negara anggotanya yang akan menjadi tuan rumah serta negara-negara yang akan mengikuti piala dunia sepak bola. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pergesekan antara hukum transnasional dan nasional dalam olahraga sepak bola yang telah digunakan FIFA untuk memperkuat Hegemoninya. Penelitian yang dilakukan Jerabek serta timnya menjelaskan bagaimana Swiss sebagai lokasi kantor pusat FIFA menekan hegemoni FIFA dalam dunia sepak bola internasional.²⁰

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi kekuasaan antara negara-negara dan difusi kekuatan antara negara dan aktor non-negara adalah hal yang penting dalam perdebatan tentang pengaruh hegemonik FIFA dalam sepak bola, penelitian ini juga menjelaskan bahwa pemerintah bukan berarti tidak lagi penting namun difusi kekuasaan berarti bahwa negara tidak lagi menjadi aktor tunggal di arena internasional. Penelitian ini dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa FIFA memiliki dua manifestasi dalam setiap studi kasus yang dijelaskan di dalam penelitian ini yang pertama adalah mengesampingkan hukum nasional

²⁰ Marketa Maria Jerabek, Alisson Maxwell Ferreira de Andrade, and Ana Magdalena Figueroa, “FIFA’s Hegemony: Examples from World Cup Hosting Countries,” *Global Society* 31, no. 3 (2017): 417–440, <http://dx.doi.org/10.1080/13600826.2016.1261807>.

melalui hukum transnasional, dan yang kedua adalah kekuatan FIFA untuk menetapkan persyaratan dari proses penawaran.²¹

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah letak fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada kasus FIFA dalam Piala dunia, penulis berfokus pada kasus *Blue Girl* di Iran. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada waktu dan fokus isu yang berfokus pada gender. Penulis akan menggunakan studi pustaka ini sebagai acuan dalam mengetahui tingkat dan kekuatan pengaruh FIFA dalam dunia internasional terkait dengan persepakbolaan dunia.

Studi Pustaka yang keempat dilakukan oleh Kim Toffoleti dengan judul "*Iranian Women's Sports Fandom: Gender, Resistance, and Identity in the Football Movie Offside*" yang dilakukan pada tahun 2012. Penelitian memiliki fokus penelitian pada peran wanita Iran dalam film *Offside* yang bertemakan sepak bola dimana film ini bersifat penting sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender di Iran yang mana film ini menjelaskan bagaimana sulitnya penggemar sepak bola wanita di Iran untuk menonton sepak bola di stadion Iran, penelitian ini juga menyebutkan bahwa film *Offside* yang mana memiliki pemeran utama wanita memiliki nilai yang menjelaskan bahwa fandom (perkumpulan penggemar) sepak bola wanita sebagai wahana untuk menumbangkan mekanisme pengaturan yang menginformasikan artikulasi gender di Iran kontemporer.²²

²¹ Jerabek, A. Ferreira de Andrade, and A. Figueroa, "FIFA's Hegemony: Examples from World Cup Hosting Countries."

²²Kim Toffoletti, "Iranian Women's Sports Fandom: Gender, Resistance, and Identity in the Football Movie Offside," *Journal of Sport and Social Issues* 38, no. 1 (2014): 75–92.

Pembeda studi pustaka ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang berfokus pada perubahan kebijakan Iran yang berubah dimana hal ini sangat berbeda dengan fokus penelitian dari studi pustaka ini yang menjelaskan alasan perubahan kebijakan tersebut. Peneliti akan menggunakan studi pustaka ini sebagai dasar dalam menjelaskan bentuk kebijakan pemerintah Iran terkait wanita di dalam stadion sebelum dan pasca revolusi islam di Iran.

Studi Pustaka yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Stuart Murray dan Geoffrey Allen Pigman yang memiliki judul “Mapping the relationship between international sport and diplomacy” pada tahun 2014. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara diplomasi dan olahraga secara teori. Penelitian ini memiliki kesimpulan dalam memahami diplomasi khusus olahraga internasional dapat menghasilkan hal yang dapat memungkinkan organisasi olahraga internasional untuk memenuhi tujuan mereka dalam memfasilitasi kompetisi olahraga internasional paling sukses yang dimungkinkan, penelitian ini menemukan bahwa FIFA sebagai organisasi internasional sedang mengalami kerusakan reputasi terkait skandal yang melibatkan proses seleksi piala dunia, namun hal ini memberikan peluang bagi FIFA agar dapat memperbaiki reputasinya dan melakukan inisiatif diplomatik yang melibatkan olahraga sepak bola ke negara-negara anggotanya.²³

Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus dari penelitian serta waktu dan wilayah yang akan diteliti, penulis akan menggunakan studi pustaka ini untuk membantu penulis menjelaskan beberapa cara

²³Stuart Murray and Geoffrey Allen Pigman, “Mapping the Relationship between International Sport and Diplomacy,” *Sport in Society* 17, no. 9 (2014): 1098–1118.

dan teknik yang digunakan oleh FIFA dalam usahanya untuk mempengaruhi kebijakan domestik Iran sebagai negara yang berdaulat.

1.7. Kerangka Pemikiran

1.7.1. *Compliance Theory*

FIFA sebagai organisasi internasional yang memiliki aturan yang harus dipatuhi anggotanya memberikan efek terikat kepada anggotanya, Iran adalah salah satu negara anggota FIFA dan memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang diciptakan oleh FIFA sebagai organisasi sekaligus rezim internasional.

Negara adalah sebuah wilayah yang memiliki sistem pemerintahan dengan kedaulatan yang sah atas pemerintahan di dalamnya, secara anggapan tradisional menurut Beth A. Simmons pemerintah nasional pada umumnya adalah sebuah bentuk pemerintahan yang selalu ingin mempertahankan kedaulatan hukum mereka, khususnya pada satu-satunya otoritas yang memiliki tugas untuk menilai penerimaan kebijakannya di bidang internasional. Negara dipandang sebagai pembuat komitmen, terutama komitmen hukum dan kebijakan secara hati-hati, dan biasanya tidak akan mudah untuk mendelegasikan pengambilan keputusan dari dan kepada badan supranasional seperti organisasi internasional dalam bentuk apapun.²⁴

Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes berpendapat bahwa negara akan patuh bukanlah karena takut akan sanksi, melainkan dikarenakan adanya norma dalam hukum internasional yang dapat memicu negara untuk patuh. Chayes dan Chayes berpendapat bahwa *Enforcement Model* dengan cara koersif merupakan metode yang

²⁴ Beth A. Simmons, "Compliance With International Agreements," *Annual Review of Political Science* 1, no. 1 (1998): 75–93.

tidak efektif untuk menciptakan kepatuhan sehingga harus diganti dengan metode *Managerial Model* yang menggunakan instrumen manajemen untuk mendorong terjadinya kepatuhan, hal ini seperti *dispute resolution*, *capacity building*, transparansi, dan pelaporan.²⁵

Andrew T. Guzman berpendapat bahwa kepatuhan terjadi karena kekhawatiran negara tentang sanksi reputasi dan sanksi langsung yang dipicu oleh pelanggaran hukum. Guzman menjelaskan bahwa negara akan mematuhi sesuatunya berdasarkan pada reputasi baik buruknya negara di mata dunia serta jumlah insentif yang akan diterima negara ketika mematuhi hukum internasional tersebut, Guzman berpendapat bahwa negara akan tidak patuh kepada permintaan kepatuhan ketika keuntungan yang didapatkan tidak lebih tinggi dari ketidakpatuhan negara tersebut.²⁶

Oran Young (1979) mendefinisikan bahwa kepatuhan dapat dikatakan terjadi ketika perilaku aktual dari subjek yang diberikan sesuai dengan perilaku yang ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku aktual berangkat secara signifikan dari perilaku yang ditentukan. Definisi ini membedakan kepatuhan dari efektivitas, karena sangat mungkin bahwa perjanjian yang dirancang dengan buruk dapat mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi tanpa banyak berdampak pada fenomena yang menjadi perhatian (misalnya tingkat polusi), meskipun kepatuhan mungkin diperlukan untuk efektivitas.²⁷

²⁵ Andrew T Guzman, "A Compliance-Based Theory of International Law," *How International Law Works* (2008): 25–70.

²⁶ Guzman, "A Compliance-Based Theory of International Law."

²⁷ Simmons, "Compliance With International Agreements."

Ronald B. Mitchell mengatakan bahwa negara akan patuh kepada hukum dan organisasi internasional berdasarkan pada *Rational Actor Model*, dimana dia menyampaikan bahwa negara akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi negaranya. Negara akan mengikuti aktor yang paling rasional menurutnya dimana aktor yang paling kuat investasinya akan menentukan tindakan apa yang menjadi kepentingan negara tersebut. Mitchell juga menyampaikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan negara diantaranya seperti posisi negara yang relatif dengan negara lain, Sumber Daya Alam, Ekonomi, Politik, dan Sosial serta kendala-kendala sosial di dalamnya, preferensi dan disposisi warga negaranya, serta faktor-faktor lainnya yang semuanya diasumsikan akan mempengaruhi kepatuhan negara terhadap hukum dan organisasi internasional. Mitchell menjelaskan teori kepatuhan yang berfokus pada rezim internasional dan hukum lingkungan. Peneliti menggunakan teori yang di sampaikan oleh Mitchell dengan tujuan untuk menjelaskan alasan perubahan kebijakan sebuah negara yang kemudian memilih untuk patuh kepada rezim internasional.

Mitchell menyatakan bahwa kepatuhan negara memiliki dua alasan yaitu :

a. Kepatuhan karena keinginan sendiri (*Compliance cause of Self Interest*)

Mitchell menyatakan bahwa negara akan memilih patuh karena adanya tiga indikator dasar diantaranya :

1. Ketidakpastian dan efek samping yang tidak diketahui negara jika tidak mematuhi organisasi internasional

Negara berkemungkinan akan memiliki perilaku antisipatif terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat dan akan diimplementasikan di negaranya. Negara

berdaulat cenderung akan memiliki pemikiran bahwa dengan mematuhi kebijakan yang akan dibentuk adalah pilihan paling rasional ketika negara tersebut tidak mengetahui hal yang akan terjadi ketika negara tidak mematuhi kebijakan tersebut.²⁸

2. Rasa takut akan opini publik

Negara akan memilih untuk patuh karena rasa takut akan opini publik terhadapnya, dimana sebenarnya tindakan dan opini publik tidak dapat secara signifikan mempengaruhi sikap negara. Negara memiliki dua alasan mengapa memilih untuk patuh kepada kebijakan yang akan mengubah atau dibentuk di negaranya. Alasan pertama yaitu alasan normatif, negara akan memilih untuk patuh yaitu untuk memastikan unsur-unsur utama demokrasi terjaga dengan melindungi hak-hak warga negara serta kesejahteraan masyarakatnya. Alasan kedua yaitu alasan fungsional, negara akan memilih untuk patuh dengan tujuan memastikan efektivitas negara sebagai penghasil *public goods* serta sebagai senjata utama untuk melawan *free rider* yang menggelapkan pajak.²⁹

3. Penekanan biaya pengambilan keputusan, untuk memuaskan serta sesuai dengan SOP negara³⁰

Berdasarkan pada model persetujuan Margaret Levi, negara akan memilih patuh terhadap kebijakan ketika negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk patuh dengan ketentuan negara tersebut telah mengikuti prosedur dimana negara lain

²⁸ Julien Étienne, "La Conformation Des Gouvernés - Compliance Theories," *Revue Francaise de Science Politique* 60, no. 3 (2010): 493–517.

²⁹ Étienne, "La Conformation Des Gouvernés - Compliance Theories."

³⁰ Ronald B Mitchell, "Compliance Theory: A Shynthesis," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* Vol 2 No.4 (1993): 327–334.

juga mematuhi hal yang sama. Negara berupaya memaksimalkan manfaat dari kebijakan yang dibentuk dan membatasi biaya seminimal mungkin untuk kebijakan tersebut.³¹

b. Kepatuhan karena adanya ikatan saling ketergantungan (*Compliance cause of Interdependent Self Interest*).

Negara sebagai aktor yang memiliki hubungan dengan negara lain akan memilih untuk patuh karena adanya hubungan saling ketergantungan dengan negara lainnya, hal ini dinyatakan oleh Mitchell bahwa negara akan memilih untuk patuh selama cukup banyak negara atau aktor lain yang turut mematuhi hukum atau organisasi internasional. Mitchell menyampaikan bahwa hasil perjanjian tersebut cenderung akan stabil, tidak ada yang memiliki insentif untuk melanggar, dan tidak ada masalah sanksi yang muncul.³²

Mitchell juga menyatakan bahwa negara akan melakukan ketidakpatuhan karena tiga alasan yaitu :

a. Ketidakpatuhan karena memilih untuk tidak patuh (*non-compliance cause of preference*), dimana negara memilih untuk tidak patuh dikarenakan negara menemukan bahwa biaya dan manfaat yang didapatkan ketika negara tidak patuh lebih baik dibandingkan dengan ketika negara memilih untuk patuh, begitupula sebaliknya negara akan memilih patuh jika patuh adalah pilihan terbaik bagi negara.

³¹ Étienne, "La Conformation Des Gouvernés - Compliance Theories."

³² Mitchell, "Compliance Theory: A Shynthesis."

- b. Ketidakpatuhan karena tidak mampu untuk mematuhi (*non-compliance cause of incapacity*), hal ini disampaikan oleh Mitchell bahwa negara tidak mampu mematuhi hukum dan organisasi internasional dikarenakan mereka kekurangan sumber daya untuk melakukannya, ketidakmampuan keuangan, administrasi, atau teknologi yang dapat menghambat kepatuhan negara tersebut jika memilih untuk mematuhi organisasi internasional.
- c. Ketidakpatuhan karena kelalaian (*non-compliance cause inadvertence*), hal ini terjadi dikarenakan negara yang telah memilih untuk patuh tidak berhasil mengubah perilaku warga negaranya serta perusahaan yang terkait dengan organisasi internasional yang dipatuhi, implementasi yang berantakan serta hambatan-hambatan yang ada dapat menyebabkan negara gagal dalam mematuhi organisasi internasional.³³

Berdasarkan pada perbandingan teori kepatuhan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa negara sebagai aktor yang memiliki kedaulatan akan mematuhi hukum dan organisasi internasional ketika adanya keuntungan yang didapatkan oleh negara tersebut serta memiliki alasan yang benar-benar penting untuk membuat negara patuh kepada kebijakan dari organisasi internasional yang ditargetkan. Peneliti akan menggunakan teori kepatuhan yang disampaikan oleh Ronald B. Mitchell untuk menjelaskan penelitian yang akan diteliti. Peneliti menggunakan teori kepatuhan Mitchell dengan alasan bahwa Mitchell menjelaskan kepatuhan negara kepada sebuah

³³ Ronald B Mitchell, "Compliance Theory - Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law," *Oxford Handbook of International Environmental Law* (2007): 893–921.

rezim atau organisasi internasional secara rinci, penjelasan mitchell dalam penelitiannya yang berjudul *Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes* menjelaskan bahwa penelitian Ronald B. Mitchell sangat berfokus pada rezim dan organisasi internasional yang dapat melakukan intervensi kepada negara anggotanya.³⁴ Penelitian Mitchell ini menjelaskan kekuatan dan kelemahan rezim secara menyeluruh sehingga peneliti memustuskan untuk menggunakan teori kepatuhan kepada rezim yang dijelaskan oleh Ronald B. Mitchell.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berusaha menjelaskan tentang kualitas sebuah penelitian, menjelaskan tentang makna, kondisi, dan data-data yang tidak dapat dijawab menggunakan angka. Metode kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk eksplanatif dan deskriptif, peneliti menggunakan metode eksplanatif dalam penelitian ini, metode eksplanatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjelaskan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa keadaan orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Cara memperoleh data dari penggunaan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data berupa buku-buku dan jurnal ilmiah serta website yang

³⁴ Ronald B. Mitchell, "Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes," *International Studies Quarterly* 42, no. 1 (1998): 109–130.

membahas tentang Kebijakan Iran *Ban on Women in Soccer Stadium* dan Kebijakan FIFA *Living Football*.

Adapun jenis penelitian ini adalah eksplanatif analisis. Penelitian berjenis eksplanatif analisis yaitu penelitian yang berfokus menganalisis keterkaitan atau pengaruh antar variabel dalam mengkaji suatu isu atau fenomena secara lebih mendalam dan terperinci, dimana tujuan utamanya yaitu untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat dari data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan alasan Iran mengubah kebijakan *Ban on Women in Soccer Stadium* miliknya pasca dibeikan sanksi oleh FIFA.

1.8.2. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada alasan Iran memilih untuk patuh kepada FIFA pasca sanksi FIFA 2019. Penelitian ini memiliki batasan waktu dalam empat tahun terakhir karena pada tahun 2015 PBB sebagai organisasi pemerintahan internasional yang memberikan peringatan terkait gender kepada Iran namun tidak diacuhkan oleh Iran dan bahkan membuat kebijakan yang semakin mendiskriminasikan wanita di negaranya, hingga tahun 2019 dimana Iran mengubah kebijakannya terkait gender di negaranya setelah diberikan sanksi oleh FIFA.

1.8.3. Unit Analisis, Unit Ekspalanasi, dan Level Analisis

Unit analisis atau dapat disebut sebagai variabel dependen; merupakan objek yang dianalisis atau dijelaskan dalam sebuah penelitian,³⁵ dalam penelitian ini Unit Analisisnya adalah Iran. Unit ekspalanasi atau sebagai variabel independen, merupakan

³⁵ Laura Roselle and Sharon Spray, *Research and Writing in International Relations*, Longman, 2016.

unit yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis,³⁶ dalam penelitian ini unit eksplanasinya yaitu peringatan dan sanksi FIFA. Tingkat analisis atau level analisis merupakan acuan posisi dari unit yang diteliti.³⁷ Penelitian ini memiliki level analisis negara dikarenakan penelitian ini berfokus kepada perjanjian hukum serta perubahan yang terjadi dinegara Iran dan alasan kepatuhannya kepada FIFA.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pendekatan studi pustaka atau *literature research* dan metode berbasis internet. Penelitian dengan menggunakan pendekatan studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode berbasis dokumen melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai referensi ilmiah yang ada, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, skripsi terdahulu, artikel berita, website dan berbagai publikasi ilmiah lainnya yang memiliki hubungan dan relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Peneliti menggunakan metode internet dan jurnal untuk mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau informasi atas peristiwa tertentu yang ingin dicari untuk mendukung penelitian ini. Peneliti menggunakan metode berbasis Internet dengan *keyword* di antaranya yaitu FIFA, *Blue Girl*, *Iran Policy*, *Gender Issue*, *Compliance*, dan beberapa hal yang berhubungan dengan *keyword* tersebut. Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari bentuk dan jenis interaksi yang terjadi antara Iran dan FIFA, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi interaksi antara Iran dan FIFA.

³⁶ Roselle and Spray, *Research and Writing in International Relations*.

³⁷ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional - Disiplin Dan Metodologi" (Yogyakarta: LP3ES, 1990).

1.8.5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan metode kualitatif eksplanatif yang mana penulis menggunakan data berupa dokumen jurnal ilmiah, dokumen resmi, catatan pengamatan, dan data yang berasal dari internet yang memiliki referensi ilmiah yang dapat dipercaya.

Peneliti menggunakan metode ini untuk memahami secara lebih akurat alasan mengapa Iran yang telah mempertahankan kebijakannya selama 40 tahun mengubah kebijakannya setelah diberikan sanksi oleh FIFA, dan berusaha untuk menjelaskan secara rinci mengenai hasil analisis yang berada di dalam rumusan-rumusan masalah penelitian ini. Peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya untuk dijadikan sebagai sumber yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis rumusan masalah dan mencari jawaban dari penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik analisis berdasarkan pada indikator-indikator yang dijelaskan dalam kerangka konsep kepatuhan Ronald B. Mitchell, dimana diantaranya yaitu alasan negara patuh kepada sebuah organisasi internasional yang ditetapkan oleh sebuah rezim seperti FIFA;

a. Kepatuhan karena keinginan sendiri (*Compliance cause of Self-Interest*)

Peneliti menggunakan indikator kepatuhan Iran karena keinginan sendiri berdasar pada kesadaran bahwa efek samping apa yang diterima Iran ketika tidak mematuhi FIFA dan tidak mengubah kebijakannya, opini publik yang seperti apa yang ditakuti oleh Iran, serta menjawab pertanyaan tentang memuaskan siapakah Iran ketika mengubah kebijakannya terkait gender dan mengizinkan wanita menonton langsung pertandingan sepak bola di dalam stadion.

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan konsep kepatuhan Iran karena keinginan sendiri berdasarkan pada alasan negara memilih untuk patuh terhadap sebuah organisasi internasional di antaranya, yaitu : 1) Ketidakpastian dan Efek Samping jika Iran Tidak Mematuhi FIFA, 2) Rasa Takut Pemerintah Iran Akan Opini Publik, dan 3) Kepatuhan Iran dengan Tujuan Penekanan Biaya Pengambilan Keputusan, untuk Memuaskan Serta Sesuai dengan Kewajiban Negara.

b. Kepatuhan karena adanya ikatan saling ketergantungan (*Compliance cause of Interdependent Self-Interest*)

Peneliti melihat dengan negara manakah Iran memiliki ketergantungan sehingga Iran pada akhirnya mau mengubah kebijakannya terkait gender dan mengizinkan wanita memasuki stadion Azadi untuk menonton pertandingan sepak bola pria secara langsung. Peneliti melihat melalui indikator berupa bentuk-bentuk pertemuan yang dilakukan oleh Iran, perjanjian serta pengaruh kepentingan nasional Iran dalam ikatan saling ketergantungan Iran dengan aktor internasional lain.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 Bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan dan menguraikan isi dari pendahuluan diantaranya yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konsep, Metode Penelitian.

Bab II: Kebijakan Pelarangan Wanita di Dalam Stadion Sepak Bola Iran

Bab ini akan menjelaskan mengenai awal mula Iran membuat kebijakan pelarangan wanita dalam stadion sepak bola, bentuk toleransi di Iran dan Sepakbola, serta kebijakan pelarangan wanita di stadion Iran.

Bab III : FIFA dan Kebijakan *Living Football*

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan *Living Football* FIFA sebagai rezim yang mengatur sepak bola dunia, kebijakan FIFA terkait gender, serta signifikansi FIFA terhadap Iran.

Bab IV: Analisis Perubahan Kebijakan *Ban on Women in Soccer Stadium Iran* Pasca Sanksi FIFA 2019

Di dalam bab ini penulis akan menganalisis alasan perubahan kebijakan Iran pelarangan wanita di dalam stadion Iran berdasar pada sanksi yang diberikan oleh FIFA menggunakan konsep kepatuhan terhadap perubahan kebijakan Iran.

Bab V: Kesimpulan

Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta jawaban dari hasil perumusan dan pertanyaan penelitian yang telah dianalisis menggunakan konsep dan teori.

